Bhumi Kaḍiri: Konstruksi Geopolitik Peradaban Masa Jawa Kuno Abad XI-XII Masehi

A'ang Pambudi Nugroho[1], Gusti Garnis Sasmita[2]
[1]Arkeologi FIB Universitas Andalas
[2]Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Email: [1]aang.pambudi@hum.unand.ac.id, [2]gustigarnis@gmail.com

ABSTRACT

Bhūmi Kaḍiri is a wide area of political power by Pangjalu Kingdom government at the 11th-12th centuries AD. The scope of authority area can be known based on the distribution of cultural heritage elements that form the cultural area, including Kediri Region and surrounding areas. The elements of cultural heritage are the King's Gift Inscriptions, Quadrate Inscriptions, and Artifact of Miniature Houses (Durung). The distribution of cultural heritage in Bhumi Kaḍiri shows the existence of a geopolitical space that was purpose constructed by the Pangjalu kings and their high officials to maintain political power and regional sovereignty from enemy attacks. This study uses a historical research method with a landscape archeology approach. The results of the study show that Bhumi Kaḍiri has a natural landscape in the form of lowlands surrounded by mountains as natural fortresses. Meanwhile, the gaps in the lowlands between the two mountains became the residence of soldiers and people who loyally protected the kingdom as a fortress of the soul. The geo-political construction of Bhūmi Kaḍiri is a heritage of knowledge about regional defense in ancient civilization on the Brantas River in the 11th-12th centuries AD.

Keywords: Bhūmi Kaḍiri, Cultural Area, Geopolitical, Defense

ABSTRAK

Bhūmi Kaḍiri merupakan suatu kawasan luas dari kekuasaan politik pemerintahan Kerajaan *Pangjalu* abad XI-XII Masehi. Jangkauan daerah kekuasaan tersebut dapat diketahui berdasarkan persebaran unsur-unsur tinggalan budaya yang membentuk daerah kebudayaan, meliputi Daerah Kediri dan sekitarnya. Unsur-unsur tinggalan budaya tersebut yaitu Prasasti Anugerah Raja, Tulisan Kuadrat, dan Artefak Miniatur Rumah (*Durung*). Persebaran tinggalan budaya di *Bhumi Kaḍiri* menunjukkan adanya ruang geopolitik yang sengaja dikonstruksi oleh para raja *Pangjalu* dan pejabat tingginya untuk mempertahankan kekuasaan politik dan kedaulatan wilayah dari serangan musuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan arkeologi lanskap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bhūmi Kaḍiri* memiliki bentang alam berupa dataran rendah dikelilingi gunung-gunung sebagai benteng alam. Sementara itu, celah-celah dataran rendah di antara kedua gunung tersebut menjadi tempat tinggal para prajurit dan masyarakat yang setia melindungi kerajaan sebagai benteng jiwa. Konstruksi geopolitik *Bhūmi Kaḍiri* merupakan warisan pengetahuan tentang pertahanan wilayah dalam peradaban kuno di Sungai Brantas abad XI-XII Masehi.

Kata Kunci: *Bhūmi Kaḍiri*, Daerah Kebudayaan, Geopolitik, Pertahanan

A. Pendahuluan

Kerajaan masa Jawa Kuno Abad VIII-XV Masehi memiliki sistem administrasi wilayah yang terstruktur, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga daerah-daerah kekuasaannya. Wilayah administrasi kerajaan masa Jawa Kuno tersebut terbingkai dalam skala keruangan luas yang disebut dengan istilah "*bhūmi*". Salah satunya yaitu *Bhūmi Kaḍiri* yang berada di Jawa bagian Timur, serta pernah menjadi panggung sejarah Kerajaan Pangjalu abad XI-XII Masehi. *Bhūmi Kaḍiri* bukan hanya sekedar satuan ruang geografis daerah kekuasaan Kerajaan Pangjalu saja, namun lebih juga menjadi ruang geopolitik peradaban masa Jawa Kuno.

Topik penelitian ini sebenarnya merupakan pengembangan penelitian sebelumnya dalam bab konstruksi daerah kebudayaan abad XI-XII Masehi di Jawa Timur. Daerah Kebudayaan tersebut telah diketahui berdasarkan adanya persebaran unsur-unsur tinggalan arkeologinya di Wilayah Kediri dan sekitarnya, terdiri dari: Prasasti Anugerah Raja, Tulisan Kuadrat, dan Artefak Miniatur Rumah (*Durung*) (Nugroho, 2022). Setelah dipahami lebih jauh, ternyata persebaran unsur-unsur tinggalan arkeologi tersebut juga manunjukkan adanya pengetahuan geopolitik *Bhūmi Kaḍiri* dari para raja *Pangjalu* dan pejabat tingginya. Latar belakang hadirnya pengetahuan geopolitik tersebut tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah panjang Kerajaan Pangjalu sebagai penguasa *Bhūmi Kaḍiri*, sejak pembagian kekuasaan Raja Airlangga dua atas Kerajaan Janggala dan Pangjalu pada akhir periode pemerintahannya sekitar pertengahan Abad XI Masehi (Susanti, 2010; Hardiati *et.al*, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali istilah "*Kaḍiri*" sebagai suatu "*bhūmi*" dalam konteks lanskap geopolitik peradaban abad XI-XII Masehi di Jawa Timur, bukan nama kerajaan seperti yang telah banyak disebutkan dalam beberapa penelitian terdahulu. Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu secara diakronik juga lebih banyak memberikan batasan waktu abad XII Masehi. Sementara itu, berdasarkan sumber data epigrafis yang telah ditemukan, proses awal dari upaya konstruksi geopolitik *Bhūmi Kaḍiri* sudah dimulai sekitar pertengahan

abad XI Masehi. Selanjutnya, penelitian terdahulu secara sinkronik juga masih banyak yang berfokus pada situs-situs tinggalan arkeologi abad XI-XII Masehi di sekitar wilayah Kabupaten Kediri, belum mencangkup kawasan yang lebih luas (Soekmono, 1969; Soekmono, 1973; Hardiati *et.al*, 2010; Riyanto, 2016; Susetyo & Hascaryo, 2017; Susetyo & Hascaryo, 2018; Suwardono, 2019).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada konstruksi lanskap geopolitik *Bhūmi Kaḍiri* abad XI-XII Masehi. Hal ini berdasarkan kajian pada persebaran prasasti anugerah penguasa Kerajaan Pangjalu sebagai penanda kebudayaan yang tersebar luas di Daerah Kediri (Kabupaten dan Kota), Trenggalek, Blitar, Nganjuk, dan Kecamatan Ngantang (masuk Kabupaten Malang).

Konsep di atas sejalan dengan pendapat Tilley (1994), menyatakan bahwa penanda kebudayaan yang dalam hal ini pada konteks arkeologi lanskap digunakan untuk membuat makna baru dari suatu tempat serta dimanfaatkan untuk pola legitimasi berhubungan dengan kontrol sosial. Lalu, Scholvin (2014) berpandangan bahwa geopolitik berfokus untuk memahami realitas fisik yang terjadi pada permukaan suatu negara, khususnya kondisi geografi yang dipahami sebagai lokasi, geografi fisik, dan struktur buatan manusia di dalam suatu ruang geografi. Penelitian ini akan melihat lanskap budaya dapat digunakan sebagai kontrol politik yang berhubungan dengan sistem pertahanan dan keamanan suatu geopolitik kerajaan masa Jawa Kuno, berdasarkan terjadinya peristiwa kesejarahan dalam satuan ruang geografi tertentu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan arkeologi lanskap. Karena sumber data yang digunakan yaitu prasasti-prasasti anugerah raja peninggalan Kerajaan Pangjalu yang termasuk dalam kategori sumber data epigrafi atau kesejarahan. Tahap-tahap dalam penelitian ini yang pertama diawali dengan pengumpulan data dan sumber data (heuristik). Kemudian melakukan kritik teks untuk mengidentifikasi keotentikan data dan sumber data, lalu interpretasi untuk menemukan dan mengidentifikasi fakta dari suatu

peristiwa masa lalu, serta terakhir historiografi (penulisan sejarah) (Sjamsuddin, 2007).

Sementara itu, pendekatan arkeologi lanskap digunakan untuk memahami persebaran tinggalan arkeologi, terutama sumber data epigrafi atau kesejarahan berupa prasasti-prasasti abad XI-XII Masehi di *Bhūmi Kaḍiri*. Selanjutnya, melalui metode dan pendekatan tersebut maka dapat dapat diketahui hubungan antara peristiwa-peristiwa sejarah yang tertulis dalam prasasti-prasasti anugerah raja dengan lingkup spasial (keruangan) bentang alam (lanskap), hingga dapat ditemukan konstruksi geopolitik *Bhūmi Kaḍiri* warisan dari para raja *Panjalu* dan pejabat tingginya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Geografis *Bhūmi Kaḍiri*

Pada penelitian sebelumnya (Nugroho, 2022), sebenarnya telah ditemukan dua daerah kebudayaan abad XI-XII Masehi yaitu: Daerah Kebudayaan lembah Bengawan Madiun di bagian barat dan Daerah Kebudayaan lembah Sungai Brantas di bagian timur dari Gunung Wilis. Namun pada pembahasan ini akan lebih berfokus terhadap daerah kebudayaan di bagian timur Gunung Wilis, atau juga disebut "*Bhūmi Kaḍiri*".

Bhūmi Kaḍiri berdasarkan persebaran unsur-unsur tinggalan arkeologi abad XI-XII Masehi, meliputi: Daerah Kediri (Kabupaten dan Kota), Trenggalek, Blitar, Nganjuk, dan Kecamatan Ngantang (masuk Kabupaten Malang). Wilayah tersebut memiliki kondisi geografis berupa dataran rendah yang subur dengan banyak ditemukan sumber mata air dan sungai-sungai alam, terutama paling besar dan panjang yaitu Sungai Brantas.

Kemudian *Bhūmi Kaḍiri* dikelilingi deretan gunung dan pegunungan sebagai benteng alam yang kokoh dan menjulang tinggi. Pada sisi barat terdapat jajaran perbukitan Gunung Wilis yang berdiri tegak membujur dari selatan ke utara. Pada sisi selatan terdapat jajaran perbukitan dari Pegunungan Selatan yang membujur dari barat ke timur. Pada sisi timur membentang dari selatan utara, terdapat jajaran perbukitan Gunung Kelud, Kawi, dan Anjasmoro. Sementara itu, pada sisi utara terdapat jajaran perbukitan Gunung Pandan (lihat gambar 1).

Gambaran kondisi geografis di atas, menunjukkan bahwa *Bhūmi Kaḍiri* memiliki wilayah yang sangat strategis digunakan sebagai lokasi keberadaaan suatu peradaban dari kerajaan besar, yaitu Kerajaan Pangjalu abad XI-XII Masehi. Tingkat kesuburan tanah yang dapat menunjang aktivitas pertanian di *Bhūmi Kaḍiri*, selain berasal dari faktor alam aliran Sungai Brantas sebagai urat nadi kebudayaan masa Jawa Kuno, juga disebabkan adanya abu vulkanik hasil letusan Gunung Kelud dalam beberapa periode tertentu (Daldjoeni, 1982; Mustopo, 2002: Cahyono, 2012).

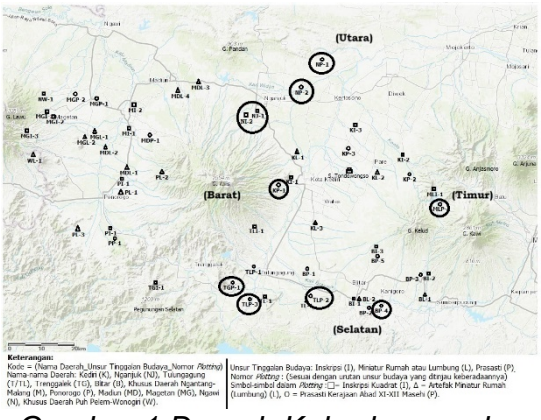

Gambar 1 Daerah Kebudayaan dan Geopolitik Abad XI-XII Masehi

2. Sistem Kewilayahan *Bhūmi Kaḍiri*

Sistem administrasi wilayah pada masa Jawa Kuno telah diketahui berdasarkan tinggalan sumber data epigrafi atau kesejarahan prasasti-prasasti dari periode Mataram Kuno (Abad VIII-X Masehi) hingga Kerajaan Majapahit (Abad XIV-XV Masehi). Kerajaan Mataram Kuno memiliki sistem administrasi wilayah dari tingkat bawah berupa daerah *wanua* atau *deśa*, kemudian di atasnya terdapat daerah *watak* atau *watêk*. Sementara itu, daerah tingkat pusat disebut *rajya* sebagai pusat kerajaan (Meer, 1979; Naerssen & Iongh, 1997; Darmosoetopo, 2003; Boechari, 2012). Kemudian di atasnya lagi sebenarnya terdapat wilayah yang ukurannya paling luas yaitu *bhūmi*.

Kemudian berdasarkan sumber data epigrafis atau kesejarahan pada prasasti anugerah raja abad XI-XII Masehi, telah terjadi transformasi dalam penyebutan satuan wilayah. Daerah tingkat paling bawah sebelumnya disebut "*wanua*" atau "*deśa*" bertransformasi menjadi *thāni*. Sementara itu, daerah *watak* atau *watêk* bertransformasi menjadi *wiṣaya* (Sedyawati, 1985; Rahardjo, 2011).

Menariknya, berdasarkan hasil kajian terhadap sumber data epigrafi atau kesejarahan dari masa Jawa Kuno (abad VIII-XV Masehi), hanya satuan wilayah *bhūmi* yang masih bertahan dan tidak mengalami

transformasi. Selain itu, satuan wilayah *rajya*, *wanua* atau *deśa* (=*thāni*) dan *watak* atau *watêk* (=*wiṣaya*) masing-masing telah disebutkan memiliki pimpinan daerah. Hal tersebut berbeda dengan satuan wilayah *bhūmi* yang belum pernah disebutkan memiliki pemimpin daerah. Diperkirakan satuan wilayah tersebut berada langsung di bawah pengawasan (kontrol) dari penguasa atau raja pusat maupun bawahan (vasal) serta pejabat tingginya. Hal ini karena satuan wilayah *bhūmi* yang ukurannya lebih luas dalam dimensi keruangan, fungsinya tidak lagi berhubungan dengan administrasi daerah dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Namun, satuan wilayah *bhūmi* dalam dimensi keruangan pada masa Jawa Kuno diperkirakan lebih berfungsi sebagai geopolitik dalam sistem pertahanan kekuasaan politik dan kedaulatan wilayah dari serangan musuh.

Zoetmulder (1982) menafsirkan istilah "*bhūmi*" sebagai "bumi, dunia, tanah, daratan, negeri, dasar, dan alas". Penggunaan arti dan makna kata tersebut harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya dalam prasasti maupun naskah kuno. Sementara itu, Rahardjo (2011) dalam kajiannya terhadap kalimat "*mḍang i bhūmi mataram*" pada prasasti masa Mataram Kuno, berpandangan bahwa konsep satuan wilayah *bhūmi* lebih diartikan sebagai "negeri". Sedyawati (1985; 1994) juga menafsirkan istilah "*bhūmi*" sebagai "negeri" yang dalam konteks periode *Kaḍiri* merupakan satuan wilayah teritorial.

Pembentukan satuan wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dalam fungsinya sebagai geopolitik, pasti mengalami proses panjang serta berdasarkan gagasan pemikiran pengetahuan yang matang dari para penguasa dan pejabat tinggi Kerajaan Pangjalu. Gagasan pemikiran dalam konstruksi geopolitik tersebut diperkirakan lahir sejak sekitar pertengahan abad XI Masehi, dilatarbelakangi terjadinya peperangan atau serangan musuh secara terus-menerus antara Kerajaan Pangjalu dengan Janggala pasca pembagian kekuasaan Raja Airlangga (Susanti, 2010). Meskipun pembagian kekuasaan tersebut telah berhasil dilakukan, namun ternyata perang antara kedua kerajaan masih sering terjadi, sehingga membutuhkan upaya preventif dan

represif melalui konstruksi geopolitik *Bhūmi Kaḍiri*.

Pada sub-bab berikutnya akan dibahas tentang bukti-bukti empiris implementasi gagasan pemikiran geopolitik *Bhūmi Kaḍiri* pada abad XI-XII Masehi. Hal tersebut terbagi dalam empat sektor konstruksi pertahanan di masing-masing penjuru utama mata angin yang terdiri dari sektor barat, utara, timur, dan selatan.

3. Konstruksi Mitigasi Bencana Peperangan di Sektor Barat

Sektor barat wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dibatasi oleh benteng alam berupa jajaran perbukitan dari Gunung Wilis yang memanjang dari selatan (Kabupaten Trenggalek), hingga ke utara (Kabupaten Nganjuk) (lihat Gambar 1). Benteng alam jajaran perbukitan Gunung Wilis yang masuk wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, posisinya tidak begitu jauh dengan dataran rendah kawasan persebaran situs-situs arkeologi penginggalan Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi). Kedua daerah tersebut dipisahkan oleh aliran Sungai Brantas. Kawasan persebaran situs-situs arkeologi peninggalan Kerajaan Pangjalu, meliputi tiga kecamatan, yaitu: Gurah, Pagu, dan Gampengrejo yang diperkirakan sebagai lokasi dan kawasan dari ibukota atau pusat peradaban Kerajaan Pangjalu.

Pada masa Jawa Kuno, daerah pegunungan yang terutama dianggap suci biasanya berfungsi sebagai lingkungan pertapaan (*wanāśrama*). Namun dalam situasi dan kondisi terjadinya serangan musuh dan peperangan juga digunakan sebagai lokasi mitigasi bencana dalam upaya pengamanan raja dan keluarganya. Peristiwa tersebut salah satunya pernah dialami oleh Śri Māharāja Kāmeśwara (±1182-1185 Masehi) yang mengeluarkan Prasasti Cêkêr (1107 Śaka atau 1185 Masehi) (Lihat Gambar 3) sebagai anugerah kepada *dūwān* (anggota dewan pimpinan daerah) (Sedyawati, 1985) yang berada di *Ckêr*. Penganugerahan tersebut berhubungan dengan suatu peristiwa kembalinya sang raja pada kekuasaannya yang berada di *Bhūmi Kaḍiri* (*mantuk ri sīma nira ring bhūmi kaḍiri*). Berdasarkan kalimat tersebut, diperkirakan berhubungan dengan mitigasi bencana peperangan pada masa pemerintahan Śri Māharāja Kāmeśwara di daerah hutan jajaran

perbukitan Gunung Wilis (Kediri). Toponim "*Ckêr*" sampai saat ini masih ditemukan menjadi Dusun Cêkêr, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Prasasti Cêkêr berasal dari sekitar daerah tersebut, lokasinya berada di sebelah barat aliran Sungai Brantas, serta sebelah timur jajaran perbukitan Gunung Wilis (Brandes, 1913; Hardiati *et.al*, 2010; Nugroho, 2022; Nastiti *et.al*, 2025).

Upaya Pembangunan jalur mitigasi bencana peperangan di jajaran perbukitan Gunung Wilis (Kediri), diperkirakan sudah dilakukan jauh sebelum masa pemerintahan Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi). Hal ini dibuktikan dengan Prasasti *Lucêm* (934 *Śaka* atau 1012 Mesehi) yang berasal dari masa pemerintahan Raja Dharmmawangśa Têguh (±996-1017 Masehi). Prasasti *Lucêm* (Lihat Gambar 2) berada di Desa Titik-Kabupaten Kediri yang berada di pertemuan antara dataran rendah dan perbukitan, tepatnya di sebelah timur perbukitan Gunung Wilis (Kediri), serta tepi aliran Sungai Nggondak. Prasasti tersebut berisi tentang upaya pelurusan patok jalan (*hnū*) yang dikerjakan oleh Samgat Lucêm bernama Pu Ghêk, ditandai dengan penanaman pohon *Boddhi* dan *Waringin* (Beringin) (Kern, 1917). Pemberian tanda pohon tersebut, berfungsi untuk mengenali jalur mitigasi bencana apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Karena jalan setapak di daerah perbukitan yang jarang dilewati masyarakat dapat menjadi rimbun tertutup tumbuh-tumbuhan liar.

Gambar 2 Prasasti Lucêm di Desa Titik, Kabupaten Kediri

Gambar 3 Prasasti Ckêr di Museum Airlangga-Kota Kediri

4. Konstruksi Penguatan Pertahanan di Sektor Utara

Sektor utara wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dibatasi oleh benteng alam berupa jajaran perbukitan

Gunung Pandan yang membujur dari barat ke timur (lihat Gambar 1). Sektor ini memiliki dua celah dataran rendah di timur laut (jalur ke Madiun-Ponorogo) dan barat laut (jalur ke Jombang-Mojokerto). Sektor utara dalam konteks periode masa Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi), posisinya dekat dengan perbatasan daerah teritorial Kerajaan Janggala.

Pertahanan sektor utara di celah timur laut pernah terjadi pada pertengahan abad XI Masehi, yaitu sekitar 10 tahun dari peristiwa pasca pembagian kekuasan Raja Airlangga atas Kerajaan Janggala dan Pangjalu. Hal ini dibuktikan dengan Prasasti Mātaji (973 Śaka atau 1051 Masehi) (Lihat Gambar 4). Prasasti tersebut berada di Desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk yang secara geografis berada di selatan perbukitan Gunung Pandan. Prasasti Mātaji dikeluarkan oleh Raja Jitendrakara yang memberikan anugerah kepada masyarakat Mātaji karena tetap menjaga kesetiaan dan telah berjasa dalam menghilangkan atau mengalahkan musuh (*satru*) dalam jumlah besar (*wadwa-wadwi*) (Suhadi & Kartakusuma, 1996; Prabarani, 2009; Susanti, 2010). Prasasti Mātaji merupakan sumber data epigrafi tertua yang menyebutkan *Hajyan Pangjalu* (Kerajaan Pangjalu),

Selanjutnya untuk sektor utara di celah barat laut lebih dekat dengan daerah kebudayaan abad XI-XII Masehi di bagian barat Gunung Wilis pada sekitar lembah Bengawan Madiun. Namun belum ada bukti peristiwa pertahanan celah barat. Meskipun demikian beberapa unsur-unsur tinggalan arkeologi dari masa Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi) masih ditemukan, salah satunya Prasasti Sumberurip di Desa Sumberurip, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk (Lihat Gambar 5). Prasasti tersebut berukuran kecil mirip lingga patok (semu) yang pada sisi utamanya, berinskripsi "*i 1116*" (Nastiti et.al, 2025) (= pada tahun 1116 [*Śaka*] atau 1194 Masehi). Angka tahun tersebut sama seperti dikeluarkannya Prasasti Kamulan (1116 *Śaka* atau 1194 Masehi) oleh Raja Kṛtajaya, sebagai anugerah atas kesetiannya dan berjasa mengalahkan musuh dalam jumlah besar berasal dari *Pūrwwa* (Timur). Diperkirakan keberadaannya masih berhubungan dengan pertahanan sektor utara.

Gambar 4 Prasasti Mātaji di Desa Bangle-Kabupaten Nganjuk

Gambar 5 Prasasti Sumberurip di Desa Sumberurip-Kabupaten Nganjuk

5. Konstruksi Penguatan Pertahanan di Sektor Timur

Sektor timur wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dibatasi oleh benteng alam berupa jajaran perbukitan Gunung Kelud-Kawi-Anjasmoro yang memanjang dari selatan (Kabupaten Blitar) ke utara (Kabupaten Jombang) (lihat Gambar 1). Sektor ini memiliki satu celah yang berada antara Gunung Kelud-Kawi dan Gunung Anjasmoro-Arjuna. Sektor timur dalam konteks periode masa Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi), posisinya dekat dengan perbatasan daerah teritorial di sebelah timur Gunung Kawi yang pada abad XIII Masehi dikenal dengan "Tumapel".

Pertahanan sektor timur di satu celah perbatasan, dibuktikan dengan Prasasti Hantang (1057 *Śaka* atau 1135 Masehi) dikeluarkan oleh Raja Jayabhaya. Prasasti tersebut berasal dari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Topinim "Hantang" dalam Prasasti Ngantang, dalam bahasa Jawa Kuno diperkirakan berasal dari kata "*anta*" berarti batas atau akhir (Zoetmulder, 1982). Berdasarkan analisis tersebut, maka daerah Kecamatan Ngantang dahulu pernah menjadi batas timur wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri* (Nugroho, 2022).

Prasasti Hantang berisi tentang pemberian anugerah Raja Jayabhaya kepada masyarakat *Hantang* karena tetap menjaga kesetiaan kepada raja, menjalankan dharmma (kewajiban moral) dengan ikut berjuang dalam mengalahkan musuh seperti ksatria (*kadi sira kṣatriya*), dan tetap berpihak kepada raja saat terjadi adanya peperangan. Usaha perjuangan yang membuahkan hasil tersebut akhirnya

membuat Raja Jayabhaya dapat duduk dalam tahtanya. Kemenangan yang berhasil didapatkan kemudian diabadikan di bagian atas-tengah prasasti itu berbunyi "*Pangjalu Jayati*" (Kemenangan Pangjalu). Prasasti Hantang juga memberitakan bahwa masyarakat Hantang sebelumnya pernah menerima anugerah dari raja atau penguasa Kerajaan Pangjalu terdahulu yang telah dicandikan di Gajapāda dan Nāgapuspa (Brandes, 1913; Wardhani, 1980). Keterangan tersebut membuktikan masyarakat Hantang memiliki kesetiaan dalam menjaga sektor timur teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dari beberapa periode masa pemerintahan Kerajaan Pangjalu.

Gambar 6 Prasasti Hantang di Museum Nasional-Jakarta

6. Konstruksi Penguatan Pertahanan di Sektor Selatan

Sektor selatan wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dibatasi oleh benteng alam berupa jajaran perbukitan Pegunungan Selatan (lihat Gambar 1). Sektor ini memiliki dua celah dataran rendah di tenggara (jalur ke Blitar-Malang) dan barat daya (jalur ke Trenggalek-Ponorogo). Sektor selatan dalam konteks periode masa Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi), posisinya berada paling jauh di ujung selatan yang berbatasan langsung dengan lautan Samudera Hindia.

Berbeda dengan ketiga sektor yang lain, pertahanan pada sektor selatan dalam konstruksi geopolitik teritorial *Bhūmi Kaḍiri* lebih banyak didominasi oleh kelompok keprajuritan atau pasukan militer dengan masing-masing simbol-simbol atau panji-panji kemiliterannya (*makasir-kasir*). Hal tersebut seperti yang tertulis dalam Prasasti Jaring (1103 *Śaka* atau 1181 Masehi) (Lihat Gambar 7), dikeluarkan oleh Raja Kroñcāryyadipa atau Śri Gandra (±1181 64 Masehi). Prasasti tersebut berada di Desa Kembang Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar yang berada di sekitar aliran

Sungai Brantas (Blitar). Prasasti Jaring berisi tentang anugerah Raja Sri Gandra kepada masyarakat Daerah Jaring dengan diperantarai (*makasopāna*) seorang tokoh *senapati sarwwajala* (panglima penjaga daerah perairan) yang bernama Sang Apañjya(_)taken (Brandes, 1913). Anugerah tersebut turun atas kesetiaan masyarakat Jaring kepada raja saat terjadi peperangan melawan musuh pada baris terdepan (*lumaga satru prangmukha*). Keterangan tersebut membuktikan Daerah Jaring pernah menjadi basis keprajuritan bagi para penjaga teritorial *Bhūmi Kaḍiri* pada celah tenggara. Prasasti tersebut memberikan bukti menarik, bahwa dalam konstruksi geopolitik teritorial *Bhūmi Kaḍiri* tidak hanya menjaga wilayah daratan saja melainkan juga wilayah perairan. Aliran Sungai Brantas di Wilayah Blitar dalam konteks teritorial *Bhūmi Kaḍiri* keberadaannya pada paling ujung tenggara, sebelum mengalir ke barat melewati Kabupaten Tulungagung, lalu belok ke utara melewati Kota dan Kabupaten Kediri.

Selanjutnya, pertahanan sektor selatan pada di celah barat daya dibuktikan dari Prasasti Kamulan (1116 *Śaka* atau 1194 Masehi), dikeluarkan oleh Raja Kṛtajaya (±1190-1222 Masehi) (Lihat Gambar 8). Prasasti ini dahulu ditemukan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Prasasti Kamulan berisi anugerah Raja Kṛtajaya kepada Sāmya Haji Kataṇḍan Sakapāt (Raja Bawahan Bertanda Empat Penjuru) dengan diperantarai oleh seorang tokoh *pangalasan* (pasukan pengawal raja) bernama *Gêngadêg* (Brandes, 1913). Anugerah tersebut turun atas kesetiaan Sāmya Haji Kataṇḍan Sakapāt bersama para prajuritnya ketika melawan musuh dari Timur (*Purwwa*) dalam jumlah besar, ketika sang raja harus melarikan diri dari keratonnya di Katang-katang. Namun, berkat jasa dari mereka akhirnya sang raja dapat bertahta kembali di *Bhūmi Kaḍiri*. Sāmya Haji Kataṇḍan Sakapāt dan para prajuritnya selalu bersiap siaga baik siang maupun malam (*makarahina-wngi mangārcca*) dalam ikut serta menjaga kedaulatan teritorial geopolitik *Bhūmi Kaḍiri*.

Pada Prasasti Kamulan juga ditemukan kelompok keprajuritan atau pasukan militer dengan masing-masing simbol-simbol atau panji-panji

kemiliterannya (*makasir-kasir*). Selain itu, kelompok tersebut juga ditemukan pada prasasti anugerah Raja Kṛtajaya lainnya yang berada di sektor selatan, seperti: Prasasti Lawadan (1127 *Śaka* atau 1205 Masehi) dan Prasasti Galunggung (1122 *Śaka* atau 1200 Masehi) (Komaruzaman, 2005; Sekali, 2004). Berdasarkan pembahasan di atas, adanya penempatan kelompok-kelompok keprajuritan pada sistem pertahanan teritorial *Bhūmi Kaḍiri* di sektor selatan, diperkirakan atas pertimbangan daerah yang sangat jauh dari pusat ibukota kerajaan tersebut agar tidak dikuasai dan menjadi basis pertahanan musuh. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mengancam kedaulatan geopolitik teritorial *Bhūmi Kaḍiri* dan keruntuhan dari masa kejayaan Kerajaan Pangjalu.

Gambar 7 Prasasti Jaring di Desa Kembang Arum-Kabupaten Blitar

Gambar 8 Prasasti Kamulan Ketika di Museum Daerah Tulungagung (Kini Berada di Pendapa Kantor Pemerintah Kabupaten Trenggalek)

D. Refleksi Hasil Penelitian Konstruksi Geopolitik *Bhūmi Kaḍiri*

Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari sejarah Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi) yaitu bahwa situasi dan kondisi kehidupan

politik selalu dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu (hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan bahkan abad ke abad). Segala bentuk permasalahan, bencana, dan ancaman bisa datang dalam setiap periode kehidupan. Namun, peradaban manusia dengan seluruh kemampuan fisik, akal budi, serta tingkat kecerdasan yang tinggi harus mampu untuk menemukan, menciptakan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan memberikan solusi cerdas pada setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini.

Perlu diketahui bahwa hasil konstruksi geopolitik teritorial *Bhūmi Kaḍiri,* merupakan suatu pengetahuan luhur dan sangat berharga yang ditemukan berdasarkan penelitian sejarah Kerajaan Pangjalu (Abad XI-XII Masehi). Hal tersebut sebagai bukti bahwa para penguasa atau raja beserta pejabat tinggi Kerajaan Pangjalu telah mampu mengatur sistem kewilayahan dalam upaya melindungi salah satu peradaban besar di lembah aliran Sungai Brantas Masa Jawa Kuno.

Implementasi pengetahuan geopolitik dalam masa pemerintahan Kerajaan Pangjalu, merupakan bukti adanya kemampuan berpikir adaptif dan protektif sebagai upaya preventif serta represif untuk mencegah serta menanggulangi serangan musuh yang dapat datang secara tiba-tiba dalam rangka mempertahankan kekuasaan pemerintahan politik dan kedaulatan wilayah peradaban *Bhūmi Kaḍiri*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa "*Kaḍiri*" bukan nama kerajaan, namun nama *bhūmi* sebagai daerah teritorial geopolitik yang luas atau nagara. Lanskap teritorial geopolitik tersebut ternyata sengaja dikonstruksi bahkan jauh sebelum berdirinya Kerajaan Pangjalu pada pertengahan abad XI Masehi. Konstruksi geopolitik teritorial *Bhūmi Kaḍiri* berfungsi sebagai upaya pertahanan dan keamanan dari serangan-serangan musuh yang terjadi terus-menerus, sejak pasca pembagian kekuasaan Raja Airlangga atas Kerajaan Janggala dan Pangjalu.

Konstruksi geopolitik untuk menjaga wilayah teritorial *Bhūmi*

Kaḍiri berupa hasil perpaduan antara benteng alam dan benteng jiwa (istilah dari Widya Nayati). Benteng alam berupa gunung-gunung, dataran rendah, dan sungai alam. Sementara itu, celah-celah dataran rendah di antara kedua gunung tersebut diisi oleh benteng jiwa kesetiaan kepada para raja dari masyarakat yang ikut serta dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorial *Bhūmi Kaḍiri*.

DAFTAR PUSTAKA

Boechari. (2012). Kerajaan Matarām Sebagaimana Terbayang dari Data Prasasti. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Brandes, J.L.A. (1913). Oud Javaansche Oorkonden (OJO), *Verhadelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (VBG)*, Dell. I-CLVI, Batavia Albrecht & Co, ‘s Hage M. Nijhoff.

Cahyono, D. (2012). Vulkano-Historis Kelud: Dinamika Hubungan Manusia-Gunung Api. *Kalpataru Majalah Arkeologi*, 21 (2), 85-102.

Daldjoeni, N. (1982). Geografi Kesejarahan I (Peradaban Dunia). Bandung: Alumni.

Darmosoetopo, R. (2003). *Sīma dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Jogjakarta: Prana Pena.

Hardiati, E.S., Soeroso, Suhadi, M. (1990). “Laporan Penelitian Situs Kepung, Kediri, Jawa Timur”, *Berita Penelitian Arkeologi No. 40*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hardiati, E.S., Djafar H., Soeroso, Ferdinandus, P.E.J., & Nastiti, T.S. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kern, H. (1917). *De Inscription van Puh Sarang (Kediri), uit 924 Caka*, VG-VII: 77-82.

Komaruzaman, A. (2005). Prasasti Lawadan 1127 Śaka (Suatu Kajian Ulang), *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya, UI.

Meer, N.C.,van, S.,van, der. (1979). *Sawah Cultivation in Ancient Java: Aspect of Development During the Indo-Javanese Period, 5th to 15th Century*. Canberra: Australian National University.

Naerssen, F,H.van & Iongh, R.C. de. (1977). The Economic and Administrative History of Early Indonesia, *Handbuch der Orientalistik,* Dritte Abteilung, Leiden: Koln. E.J. Brill.

Nastiti, T.S., Nasoichah, C., Prihatmoko, H., Meyanti, L., Griffiths, A., Bastiawan, E., Levivier, A. (2025). *Survei Prasasti Zaman Hindu-Buddha di Provinsi Jawa Timur Kota dan Kabupaten Pasuruan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, dan Nganjuk Tahun 2023*. Jakarta: Gramedia.

Nugroho, A.P. (2022). Makna Struktur Tanda Verbal dan Visual Sistem Penyampaian Ajaran Suci Tattwa (Hakikat Tertinggi) dalam Kācāryan pada Daerah Kebudayaan Abad XI-XII Masehi di Jawa Timur, *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Prabarani, S.S. (2009). Prasasti Mātaji: Sebuah Kajian Data Sejarah. *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.

Rahardjo, S. (2011). *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir.* Jakarta: Komunitas Bambu.

Riyanto, S. (2016). *Tondowongso: Tanda Peradaban Wangsa di Jawa Abad XI-XIII Masehi*. Yogyakarta: Kepel Press.

Scholvin, S. (2014). *The Geopolitics of Region Power: Geography, Economics, and Politics in South Africa.* London: Routledge.

Sedyawati, E. (1985). Pengarcaaan Gaṇesa Masa Kaḍiri dan Siŋhasāri: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian, *Disertasi*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI.

Sedyawati, E. (1994). The State Formation of Kadiri. *State and Trade in The Indonesian Archipelago, Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, Working Papers, 13,* 7-16.

Sekali, M.K. (2004). Prasasti Galuṅguŋ 1122 Śaka (1200 Masehi). *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya, UI.

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Soekmono. (1973). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius.

Soemono, R. (1969). Gurah the Link Between the Central and East Javanese Arts. *Bulletin of the Archaeological Institute of the Republic of Indonesia*, 6.

Suhadi, M. & Kartakusuma, R. (1996). Laporan Penelitian Epigrafi di Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Berita Penelitian Arkeologi,* No. 47. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Susanti, N. (2010). *Airlangga: Biografi Raja Pembaharu Jawa Abad XI*. Depok: Komunitas Bambu.

Susetyo, S., Indrajaja, A., & Hascaryo, A.T. (2017). "Peradaban Hindu-Buddha Masa Klasik Muda Abad ke 11-15: Penelitian Arkeolgi Situs Adan adan (Tinjauan Arsitektur, Religi, dan Kronologi)", *Laporan Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Susetyo, S. & Hascaryo, A.T. (2018). *Keindahan Tersembunyi di Bhumi Kāḍiri*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Suwardono. (2019). *Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha*. Yogyakarta: Ombak.

Tilley, C. (1994). *A Phenomenology of Landscape Place, Paths, and Monuments. Providence: Berg Publishers.*

Wardhani, D.S.S. (1980). Prasasti Hantang. *Skripsi*. Depok: Fakultas Sastra, UI.

Zoetmulder, P.J. (1982). *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.